

BAB 3

KRISIS GLOBAL 2008

Pada Bab 3 ini akan dijelaskan mengenai proses awal terjadinya krisis global 2008 yang berasal dari AS serta penetrasi krisis ini terhadap negara-negara lain serta kondisi Indonesia sebelum terjadinya krisis global 2010. Kondisi ini dianggap penting untuk dijelaskan guna mengetahui latar belakang situasi perekonomian serta politik di Indonesia.

3.1 Proses Awal Terjadinya Krisis Global 2008

Dunia maju berhadapan dengan krisis likuiditas besar, Krisis Kredit 2007-2008. Dengan cepat, bank-bank dan institusi finansial dunia berhenti mengeluarkan pinjaman. Di seluruh dunia, *deal* finansial pun berhenti mendadak. Di AS, banyak pembeli rumah yang potensial tidak dapat menutup pembelian mereka. Sistem finansial global mulai terperosok.¹

Kebangkrutan Lehman Brothers pada hari Senin, 15 September 2008 merupakan sebuah kejadian yang sangat menentukan. Ketika sistem finansial mendekati kejatuhan, pejabat pemerintah AS mulai melakukan intervensi. Kali ini, pemerintah AS tidak melakukan intervensi. Konsekuensi dari tidak ada intervensi dari pemerintah AS kemudian berdampak negatif. *CDSs* (*credit default swaps*) melewati ambang, dan *American International Group (AIG)*, yang memiliki posisi besar dalam *CDSs*, menghadapi pembatalan yang akan segera terjadi. Hari berikutnya, Sekretaris *Treasury* terpaksa melawan dirinya sendiri dan ikut ke dalam pengamanan AIG. Namun hal yang lebih buruk akan segera datang. Lehman merupakan salah satu pemain-pasar di industri saham komersial dan pembeli terbesar. Dana pasar uang independent banyak digunakan untuk saham

¹Smick, D. M. (2009). *Kiamat Ekonomi Global: The World is Curved*. Jakarta: Daras Books, p. 23

Lehman, dan, ketika tidak adanya cukup uang, Lehman harus menghentikan *share* di pasar uang. Hal ini menimbulkan kepanikan diantara para deposan. Kepanikan menyebar ke pasar saham. *The Federal Reserve* harus memperpanjang garansi bagi semua dana pasar uang, tindakan *short selling* saham finansial dihentikan, dan *Treasury* mengumumkan paket penyelamatan sebesar US\$700 miliar untuk sistem perbankan. Hal ini menimbulkan kelegaan sementara pada pasar saham.²

Paket penyelamatan sebesar US\$700 miliar oleh Paulson pada dasarnya tidak layak. Sekretaris *Treasury* sama sekali tidak mempersiapkan diri ketika dia mengizinkan deklarasi bangkrutnya Lehman Brothers. Ketika sistem finansial jatuh, dia harus bergegas ke Kongres tanpa gagasan jelas dalam penggunaan uang yang diajukan, dan merupakan konsep yang belum sempurna mengenai pembentukan sesuatu seperti *Resolution Trust Corporation*, yang mendapat dan pada akhirnya mengeluarkan aset-aset tabungan yang gagal dan institusi pinjaman dalam tabungan dan krisis pinjaman tahun 1980an. Sehingga dia meminta penilaian keseluruhan, termasuk kekebalan hukum. Secara tidak mengejutkan, Kongres tidak menyetujui gagasannya. Beberapa tanggapan bahwa dana ini akan lebih baik digunakan untuk menyuntikkan ekuitas ke sektor perbankan dibandingkan dengan mengambil aset dari mereka. Pada akhirnya Paulson keluar dengan gagasan namun tidak dapat melaksanakan dengan baik. Kondisi pada sistem finansial terus memburuk. Pasar saham komersial terhenti, LIBOR meningkat, *swap* semakin meluas, CDSs berkembang, dan investasi perbankan dan institusi finansial lainnya tanpa akses langsung ke *the Federal Reserve* atau kredit jangka pendek. Pada kondisi ini, *International Monetary Fund (IMF)* menggelar rapat tahunan di Washington, dimulai pada 11 Oktober 2008. Para pemimpin Eropa pergi lebih cepat dari jadwal dan bertemu di Paris pada Minggu 12 Oktober 2008. Pada pertemuan tersebut mereka memutuskan untuk menjamin, sebagai akibat dari tidak ada institusi finansial besar Eropa yang diizinkan untuk mendeklarasikan kebangkrutan. Namun mereka tidak sepakat untuk melaksanakan kebijakan ini secara bersama-sama. Dengan basis seluruh Eropa, setiap negara

² Soros, G. (2008). *The new paradigm for financial markets: the credit crisis of 2008 and what it means*. New York: PublicAffairs, p. 161

membentuk pengaturan mereka sendiri. Amerika Serikat mengikuti sistem ini dalam waktu singkat.³

Pengaturan ini memiliki efek samping kerugian yang tidak diperhitungkan sebelumnya: Mereka menanggung beban besar pada negara-negara yang tidak memberikan jaminan yang kredibel setara dengan institusi finansial mereka. Islandia sudah menunjukkan kejathan perekonomian. Bank terbesar di Hungaria menjadi subyek serangan, dan nilai tukar serta pasar obligasi pemerintah Hungaria dan negara-negara lain di timur Eropa jatuh secara drastis. Hal yang sama terjadi juga di Brazil, Mexico, macan Asia, dan dengan besaran yang jauh lebih kecul di Turki, Afrika Selatan, Cina, India, Australia, dan Selandia Baru. Mata uang Euro dan Yen melambung tinggi. Dollar AS menguat pada perdagangan secara berimbang. Kredit perdagangan di negara-negara *periphery* semakin mengering. Pergerakan mata uang yang terjal menimbulkan korban. Ekportir terkemka di Brazil terjerumus dalam kebiasaan menjual pilihan atas apresiasi mata uang dan saat ini menjadi *insolvent*, mempercepat kejatuhan finansial lokal.⁴

Kombinasi dari seluruh dislokasi ini kemudian menimbulkan dampak yang sangat besar pada perilaku dan sikap konsumen, sektor bisnis, dan institusi finansial di seluruh dunia. Sistem finansial telah berada dalam krisis sejak Agustus 2007, namun masyarakat awam belum mneyadari hal ini, sektor bisnis berjalan sebagaimana biasanya. Semua hal ini kemudian berubah pada minggu-minggu setelah 15 September 2008. Ekonomi global jatuh, dan kemudian menjadi terbukti ketika statistik Oktober dan November mulai dimunculkan. Dampak kesejahteraan sangatlah banyak. Dana pensiun, sumbangan universitas, dan lembaga amal kehilangan sekitar 20 dan 40 persen aset mereka dalam beberapa bulan—dan ini terjadi sebelum skandal Bernard Madoff sebesar US\$ 50 miliar terkuak ke publik.⁵

The Federal Reserve merespon secara penuh, memotong nilai suku bunga *the Fed* sampai dengan nol pada 16 Desember 2008, dan menaikkan keringanan

³ Ibid, p. 161-162

⁴ Ibid, p. 162-163

⁵ Ibid, p. 163

kuantitatif. Pemerintahan Obama mempersiapkan paket stimulus dua tahun sebesar US\$ 850 miliar dan beberapa tindakan radikal lainnya.⁶

Respon internasional hampir tidak terdengar. IMF telah menetujui fasilitas baru yang mengizinkan negara-negara *periphery* yang memiliki kondisi finansial yang mencukupi untuk meminjam lima kali lebih besar dari kuota pinjaman mereka tanpa syarat, namun jumlahnya kecil dan berakibat pada stigma yang terus ada. Akibatnya, fasilitas ini tidak dipergunakan. *The Fed* membuka jalur *swap* dengan Meksiko, Brazil, Korea, dan Singapura. Namun Presiden Bank Sentral Eropa Jean-Claude Trichet dikritik atas tidak bertanggungjawabnya fiskal, dan Jerman secara tegas menentang pembuatan uang yang berlebihan yang akan berakibat pada tekanan inflasi di kemudian hari. Sikap yang berbeda ini menjadikan tindakan internasional bersama sangat sulit dicapai. Hal ini juga dapat berakibat pada melebarnya rentang nilai tukar.⁷

Bangkrutnya Lehman Brothers menjadi simbol bangkrutnya sistem finansial modern yang selama ini tampak begitu megah. Faktor penyebab kebangkrutan sistem finansial global yang “dipicu” oleh krisis pada surat utang berkualitas rendah (*subprime mortgage*) ternyata begitu kompleks. Meski demikian, kita bisa mengklasifikasikan ke dalam kedua kategori besar, yaitu penyebab dari sisi fiskal dan moneter.⁸ Lehman Brothers tidak sendiri, sejumlah perusahaan, mulai dari asuransi terbesar di dunia (AIG) hingga perusahaan sekuritas besar, seperti Merryll Lynch, Morgan Stanley, dan Goldman Sachs juga turut jatuh. Mereka merupakan lokomotif penggerak perekonomian AS.⁹

Pertama, penyebab dari sisi fiskal. Sejak masuknya China ke dalam perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada bulan November 2001, produk-produk buatan Negeri Tirai Bambu tersebut membanjiri pasar global.

⁶ Ibid, p. 163-164

⁷ Ibid, p. 164

⁸ A. Prasentyantoko. (2010). *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, p. 23-25

⁹ A. Prasentyantoko. (2009). *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 227

Tentu saja, pasar AS menjadi salah satu sasaran dari produk-produk buatan China yang terkenal murah tersebut.¹⁰

Bagi perekonomian AS, ada dua persoalan yang muncul. Pertama, defisit neraca pembayaran (*current account*) AS terhadap China membengkak. Arus impor lebih besar daripada ekspor sehingga *balance sheet* Pemerintah AS harus menanggung pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Dalam waktu yang bersamaan, defisit fiskal berarti lebih banyak dollar AS yang beredar ke pasar global.¹¹

Kedua, akibat serangan produk-produk China tersebut, barang-barang buatan AS menjadi kurang kompetitif. Secara umum, perekonomian AS mengalami fase penurunan (*decline*) dan cenderung terpuruk dari sistem kompetisi global.¹²

3.2 Kondisi Indonesia Sebelum Krisis Global 2008

Satu dasawarsa pasca krisis finansial Asia tahun 1997-1998, kondisi perekonomian Indonesia secara garis besar relatif stabil meskipun belum optimal seperti halnya kondisi perekonomian sebelum krisis finansial Asia 1997-1998. Dapat dikatakan secara ekonomi politik, kondisi Indonesia pada saat sebelum terjadinya krisis global tahun 2008 relatif stabil.

Semenjak lengsernya Soeharto, Indonesia tidak hanya masih mengalami krisis finansial yang cukup berpengaruh namun juga perkembangan politik tampak masih labil. Setelah pengunduran diri Soeharto, Prof. BJ Habibie kemudian memimpin Indonesia pada tahun 1998-1999 dan kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun pada masa pemerintahannya, MPR menarik mandat Gus Dur yaitu pada tahun 2001 dikarenakan kebijakan-kebijakan

¹⁰ Op. cit

¹¹ Ibid

¹² Ibid

serta manuver politik Gus Dur yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan Indonesia. Megawati yang semula menjabat sebagai Wakil Presiden akhirnya dapat menduduki posisi Presiden RI. Pada saat akhir masa jabatan Megawati, Pemilihan Presiden dilakukan melalui Pemilihan Umum langsung. Masyarakat dapat menentukan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pemilu ini sekaligus menandakan ditegakkannya tonggak demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 2004 pemilihan Presiden secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan dan dalam pemilihan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden setelah melewati dua kali putaran. Popularitas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara psikologis kemudian juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap periode kepemimpinan SBY ini. Hal ini juga yang tercermin dalam periode-periode sebelum krisis global tahun 2008, dimana kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY masih sangat tinggi sehingga Presiden SBY dapat dengan leluasa memutuskan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu diambil guna mencegah Indonesia mengalami krisis finansial untuk yang kedua kalinya. Dengan kondisi politik seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa kondisi politik di Indonesia secara umum berada dalam kondisi yang stabil. Lebih jauh perbandingan Pemerintahan Soeharto dan SBY dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Perbandingan Pemerintahan Soeharto dan SBY

Indikator	Era Soeharto	Era SBY
Pengangkatan Presiden	Mandat dari MPR	Pemilu Langsung
Sistem Pemerintahan	Otoriter	Transisi Demokrasi
Partai Politik	3 Parpol selama 32 tahun Pemerintahan	Multi Partai

Universitas Indonesia

Indikator	Era Soeharto	Era SBY
Lembaga Legislatif	DPR dikuasai	DPR lebih dominan
Penanganan Korupsi	Tindak Korupsi marak terjadi	Komisi Pemberantasan Korupsi
Peran ABRI	Dominan sebagai kekuatan Pemerintah	Kembali kepada fungsinya sebagai alat pertahanan negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah duduk sebagai Presiden melaksanakan program ekonomi "pro-pertumbuhan, pro-masyarakat miskin, pro-pekerjaan". Selain itu SBY juga mencanangkan program anti-korupsi dan bertekad untuk menghapuskan korupsi di Indonesia.¹³ Beberapa hal yang masih dirasakan sebagai permasalahan besar antara lain adalah masih bertumpunya pertumbuhan ekonomi pada konsumsi, tingkat investasi yang masih dapat dikatakan rendah (walaupun ada kecenderungan meningkat), dan sebagai akibat kedua faktor tersebut pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh cukup baik (mencapai 5%) sejak tahun 2004 setelah beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang rendah.

Beberapa tantangan di bidang perekonomian yaitu pengangguran, kemiskinan, rendahnya pelayanan umum, dan minimnya investasi. Dalam hal pengangguran, diketahui bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan kemandekan penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal, dan pada gilirannya menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 9,7% dari total angkatan kerja pada tahun 2004. Sementara itu, tidak tersedianya lapangan kerja di sektor formal, menyebabkan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal semakin tinggi. Dalam hal kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,6% dari seluruh penduduk

¹³ *Background Note: Indonesia*. (2010, November 3). Dipetik November 7, 2010, dari [www.state.gov: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm](http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm)

Indonesia. Besarnya penduduk miskin ini diperburuk oleh minimnya kapasitas dan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, tingkat investasi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan adalah sangat minim. Rendahnya tingkat investasi antara lain disebabkan oleh buruknya iklim investasi.¹⁴

Dengan menyadari tantangan di bidang perekonomian yang begitu besar pemerintahan SBY-Kalla menetapkan sasaran pokok pembangunan lima tahun 2004-2009 sebagai berikut:

1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7% dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa) di tahun 2004 menjadi 5,1% (5,7 juta jiwa) pada tahun 2009.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dari 16,6% dari total penduduk (36,1 juta jiwa) menjadi 8,2% (18,8 juta jiwa) di tahun 2009.
3. Untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 5,5% pada tahun 2005 hingga 7,6% pada tahun 2009 (rata-rata 6,6 % pertahun selama periode 2004-2009). Pertumbuhan ekonomi ini harus berkualitas, dimana setiap persen pertumbuhannya dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.¹⁵

Era Pemerintahan SBY merupakan masa transisi demokrasi. Transisi demokrasi sendiri diawali dari proses Pemilu langsung yang menandai lahirnya proses demokrasi secara utuh di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat indikator-indikator makro ekonomi yang dapat digunakan sebagai bahan analisa kondisi perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis global tahun 2008 seperti tingkat pertumbuhan PDB, nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, dan lain

¹⁴ Abdullah, P. *CATATAN DISKUSI: Strategi Pembiayaan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan SBY-Kalla*. Dipetik November 24, 2010, dari www.bi.go.id:

¹⁵ Ibid

sebagainya. Pemerintahan SBY menargetkan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6% dari tahun 2004-2009 untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2004, PDB perkapita riil kembali normal seperti tingkatan pada saat sebelum krisis finansial Asia. Pada tahun 2008, konsumsi domestik terus menempati porsi terbesar dalam PDB, yaitu sebesar 61%, diikuti oleh investasi 27,7%, konsumsi pemerintah 8,4% dan ekspor netto 0,6%.¹⁶

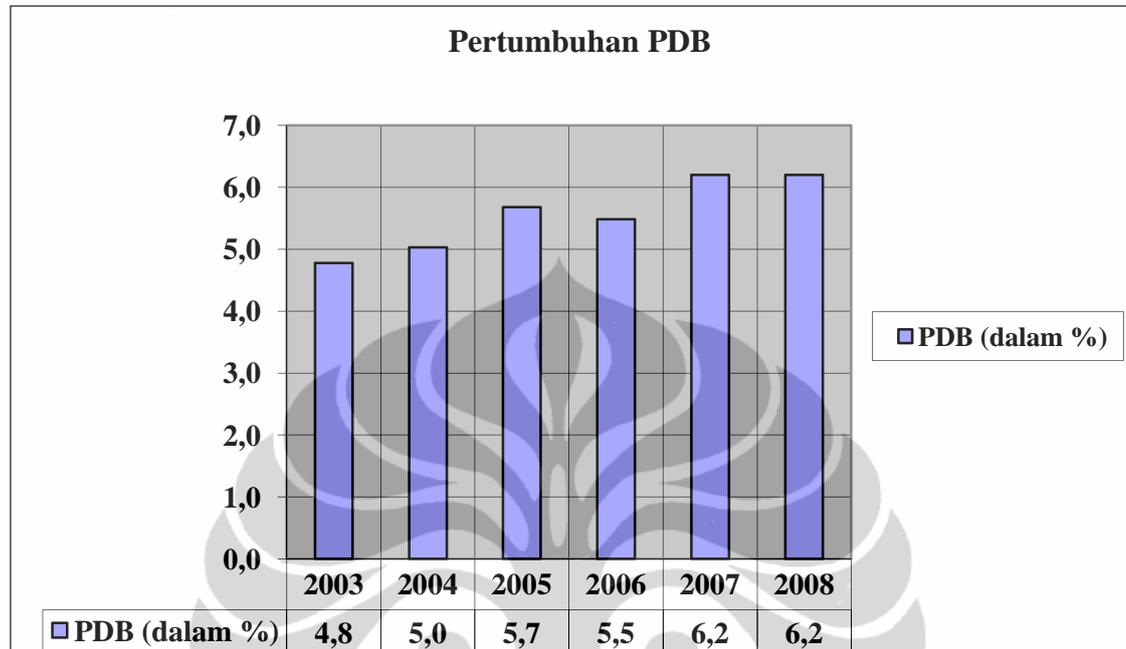
3.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertumbuhan PDB Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 rata-rata menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pasca krisis finansial Asia 1997-1998 telah kembali pulih serta bertumbuh secara positif pada periode sebelum krisis global 2008 (Gambar 3.1).

¹⁶ *Background Note: Indonesia*. (2010, November 3). Dipetik November 7, 2010, dari [www.state.gov](http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm): <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm>

Gambar 3.1

Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2003-2008



Sumber: *CEIC Data Company Ltd.*, downloaded 22 August 2008¹⁷

PDB Indonesia menurut ADB dalam *Asian Development Outlook 2008* berkembang menjadi 6,0–6,5% pada tujuh kuartal secara berturut-turut sampai dengan Juni 2008. Kontributor terbesar dalam pertumbuhan adalah konsumsi pribadi dan investasi tetap. Konsumsi pribadi meningkat dari 4,7% pada pertengahan 2007 menjadi 5,5% pada pertengahan 2008.¹⁸

Menurut data pusat badan statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,1 persen dibanding tahun 2007. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2008 mencapai Rp2.082,1 triliun, sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp1.963,1 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2008 naik sebesar Rp1.004,7 triliun,

¹⁷ Lihat *Asian Development Outlook 2008 Update*, Asian Development Bank

¹⁸ *Ibid*

yaitu dari Rp3.949,3 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp4.954,0 triliun pada tahun 2008.¹⁹

3.2.2. Pertumbuhan Investasi

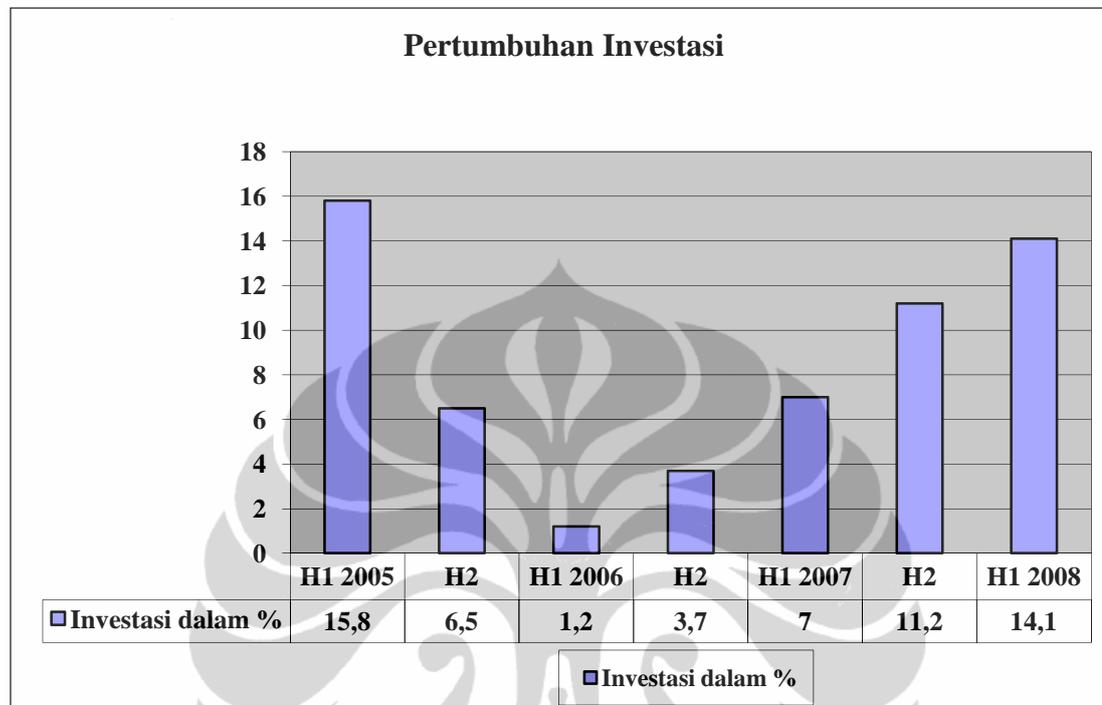
Meningkatnya pertumbuhan investasi di Indonesia yang mencapai 14,1% pada pertengahan tahun 2008 berdampak pada meningkatnya PDB Indonesia. Banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia secara otomatis akan mampu meningkatkan pendapatan domestik Indonesia baik dari segi pendapatan yang didapat dari hasil investasi maupun pendapatan yang didapat dari terbukanya lapangan kerja, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi pribadi. Dari data yang diperoleh BPS, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,1 persen didukung oleh sumber utama pertumbuhan komponen ekspor 4,6 persen, diikuti konsumsi rumah tangga 3,1 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,6 persen, dan konsumsi pemerintah 0,8 persen.²⁰ Selain itu tingkat pertumbuhan investasi yang positif juga menunjukkan bahwa kepercayaan para investor asing telah membaik sehingga para investor asing kembali mempercayakan dananya di Indonesia.

¹⁹ *Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik) No. 11/02/Th. XII: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008.* (2009, Februari 16). Dipetik November 24, 2010, dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb-16feb09.pdf): http://www.bps.go.id/brs_file/pdb-16feb09.pdf

²⁰ *Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik) No. 11/02/Th. XII: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008.* (2009, Februari 16). Dipetik November 24, 2010, dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb-16feb09.pdf): http://www.bps.go.id/brs_file/pdb-16feb09.pdf

Gambar 3.2

Pertumbuhan Investasi tahun 2005-2008



Sumber: CEIC Data Company Ltd., downloaded 22 August 2008.²¹

3.2.3. Nilai Tukar Mata Uang

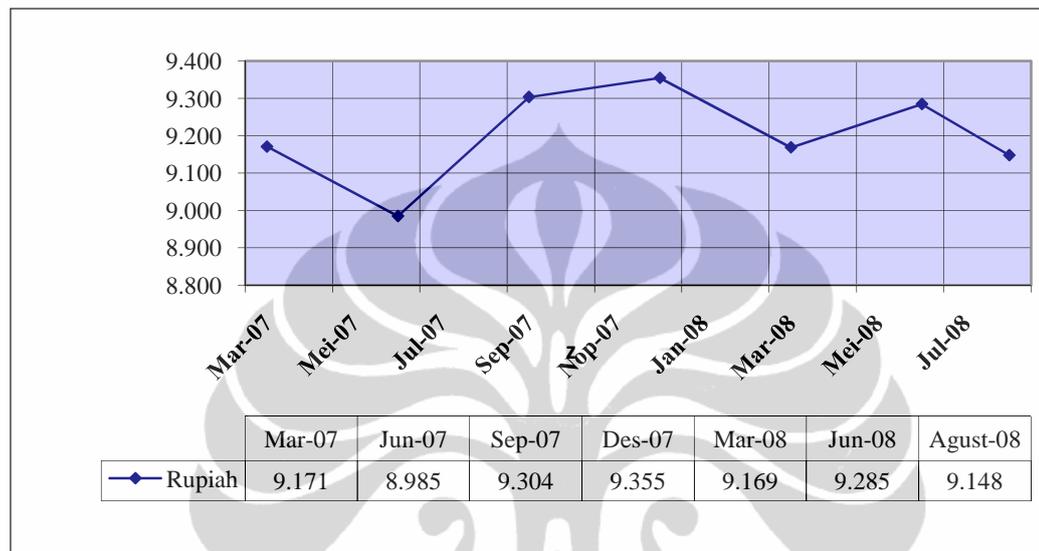
Pasca krisis finansial Asia 1997-1998, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US\$ memang tidak pernah kembali normal seperti sebelum krisis finansial yaitu pada kisaran Rp. 2.500,-/US\$. Namun Rupiah diperdagangkan dengan nilai yang relatif stabil pada tahun 2007-2008. Sebagaimana digambarkan dalam grafik di atas bahwa nilai tukar Rupiah berkisar pada Rp. 8.650,-/US\$ sampai dengan Rp. 9.500,-/US\$. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar tidak hanya dapat dilihat dari kaca mata ekonomi. Terdapat berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar ini. Salah satunya adalah iklim politik di Indonesia. Apabila iklim politik Indonesia dinilai kondusif serta akan menguntungkan untuk kelanggengan hubungan

²¹ Lihat *Asian Development Outlook 2008 Update*, Asian Development Bank

Indonesia dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, maka nilai tukar Rupiah akan cenderung menguat.²²

Gambar 3.3

Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ tahun 2007-2008



Sumber: *CEIC Data Company Ltd., downloaded 22 August 2008.*²³

Secara umum, perkembangan nilai tukar rupiah pascakrisis sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi sosial dan politik di dalam negeri yang bergejolak. Kondisi tersebut menciptakan persepsi tingginya *country risk* yang berakibat pada merosotnya kepercayaan dan memicu sentimen negatif terhadap rupiah. Situasi demikian sangat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah secara persisten dalam keranjang yang pada gilirannya memicu lingkaran permasalahan ekonomi (*vicious circle*).²⁴

Pengaruh ketidakpastian sosial politik terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pengaruh tersebut terutama tercermin dari reaksi yang bersifat segera dalam bentuk aksi beli (atau jual) valas. Secara tidak langsung, ketidakpastian sosial

²² Sjamsul Arifin (ed.). (2008). *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade setelah Krisis*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.p. 297

²³ Lihat *Asian Development Outlook 2008 Update*, Asian Development Bank

²⁴ Ibid

politik mempengaruhi fluktuasi nilai tukar melalui perubahan kepercayaan publik baik domestik maupun internasional yang mempengaruhi lalu lintas modal. Ujungnya adalah terjadinya ketimpangan permintaan atau penawaran valas (*supply-demand imbalance*).²⁵

3.2.4. Inflasi

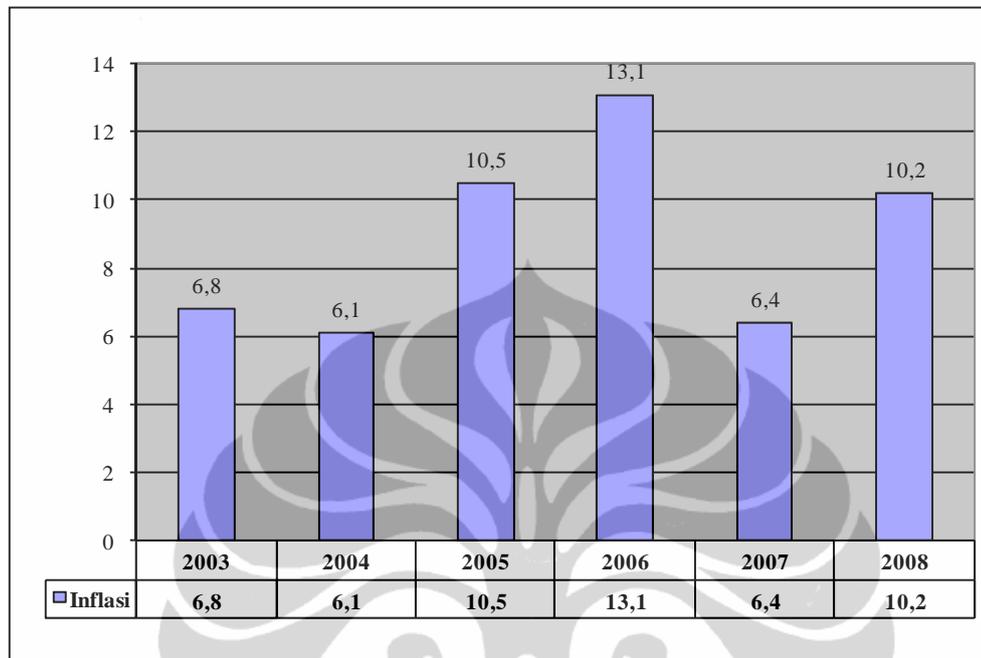
Sejalan dengan stabilnya indikator-indikator makro ekonomi lainnya, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2003-2007 relatif stabil meskipun pada tahun 2006 tingkat inflasi sempat merangkak naik.

Berdasarkan dari indikator-indikator makro ekonomi serta kondisi politik Indonesia pada tahun-tahun sebelum krisis global, maka secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam kondisi yang stabil dan baik. Kondisi ini ditambah dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY sebagaimana dijelaskan di atas, SBY dianggap mampu membantu Indonesia dalam menangani krisis global 2008 dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan penanganan krisis finansial Asia 1997-1998.

²⁵ Ibid

Gambar 3.4

Tingkat Inflasi tahun 2003-2008



Sumber: *CEIC Data Company Ltd., downloaded 22 August 2008.*²⁶

Krisis global 2008 ini melanda Amerika Serikat dengan sangat dahsyat. Bahkan negara-negara dekat Amerika Serikat yang turut menerapkan sistem kapitalis pada akhirnya terkena dampak yang juga besar. Bahkan di Amerika Serikat sendiri banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan tempat tinggal mereka karena tidak mampu untuk membayar cicilan rumah dengan suku bunga kredit yang meningkat drastis. Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat Amerika Serikat juga banyak yang kemudian menjadi pengangguran.

Krisis ini menimbulkan kerugian yang *massive* bagi masyarakat AS dan sistem kapitalis dianggap gagal untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Setelah mendengung-dengungkan sistem ekonomi liberal, AS kemudian membuat kebijakan “ke dalam” dalam artian bahwa dalam upaya penyelamatan ekonomi negara, maka Presiden terpilih Barack Obama kemudian membuat kebijakan-

²⁶ Lihat *Asian Development Outlook 2008 Update, Asian Development Bank*

kebijakan memproteksi aset-aset negara. Pemerintahan Obama menggunakan kebijakan *bail out* untuk menyelamatkan industri keuangan di Amerika Serikat. Institusi keuangan yang berpotensi atas pendanaan besar mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah. Dengan adanya kebijakan *bail out* ini kemudian institusi keuangan ini berada di bawah kekuasaan Pemerintah.

Berkaca dari krisis finansial 1997-1998, Pemerintah mengeluarkan kebijakan antisipatif untuk penanganan krisis ekonomi yang mungkin terjadi. Proses penyusunan landasan hukum dimaksud dimulai jauh sebelum terjadinya krisis tahun 2008. Untuk mengantisipasi ancaman krisis keuangan global, Pemerintah menyiapkan draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Perppu Perubahan UU Bank Indonesia, dan Perppu Perubahan UU LPS sejak awal 2008. Ketiga Perppu tersebut ditetapkan pada bulan Oktober 2008, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2008 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).²⁷

JPSK diamanatkan dalam Undang-undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. JPSK bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis dengan ruang lingkup bukan hanya meliputi perbankan saja, tetapi juga menyangkut Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan sistem keuangan nasional.²⁸

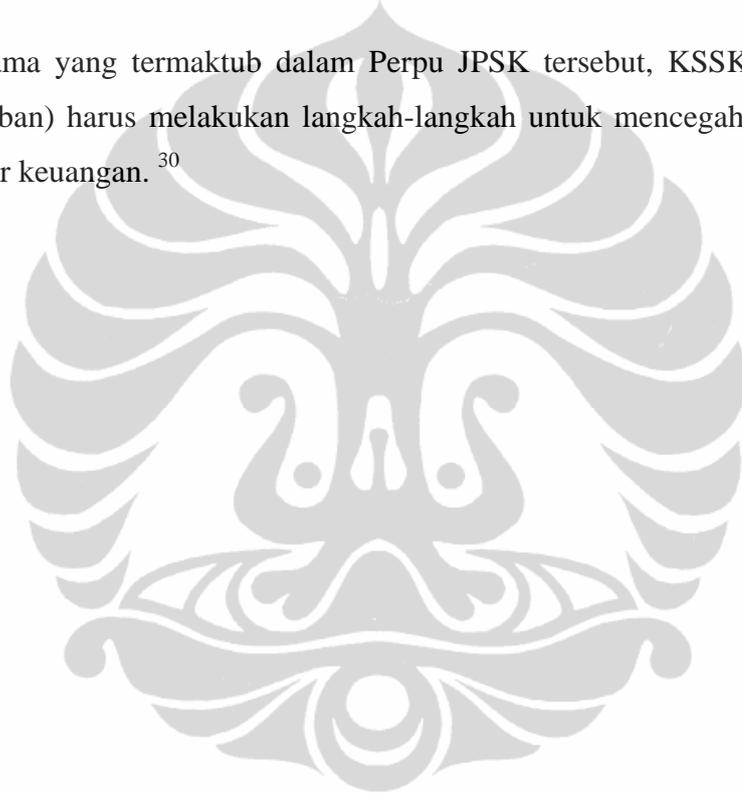
Untuk mencapai tujuan JPSK, dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Berdasarkan Perppu JPSK tersebut, yang dimaksud KSSK adalah Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur BI sebagai anggota. KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan krisis. Dalam rangka melaksanakan fungsi penetapan kebijakan

²⁷ *Respon Pemerintah Indonesia & KSSK*. (t.thn.). Dipetik Desember 12, 2010, dari <http://www.indonesiarecovery.com/>: <http://www.indonesiarecovery.com/respon-pemerintah-indonesia-dan-kssk.html>

²⁸ *Ibid*

pencegahan dan penanganan krisis tersebut, KSSK mempunyai tugas untuk mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang ditengarai berdampak sistemik, menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank/LKBB berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/LKBB yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Keputusan rapat dalam KSSK diusahakan dengan suara mufakat, namun jika tidak mufakat ketua KSSK berhak mengambil keputusan secara mandiri.²⁹

Terutama yang termaktub dalam Perpu JPSK tersebut, KSSK diberikan tugas (kewajiban) harus melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis di sektor keuangan.³⁰



²⁹ Ibid

³⁰ Ibid